

Jika melihat konflik keagamaan di Indonesia, pada masa Orde Baru hampir tidak ada konflik keagamaan yang cukup rusial terjadi.⁵ Akan tetapi, dimasa tansisi—yakni pasca Orde Baru dan lahirnya era Reformasi—mulai terlihat jelas konflik yang berwujud pada dua model utama. *Pertama*, konflik dengan cara melibatkan banyak massa dengan melalui cara damai, yaitu melalui dialog. Banyak massa yang terkumpul dalam sebuah konflik tanpa melakukan tindakan anarkis, mereka tetap dalam suasana damai dalam menyampaikan tuntutan dan kepentingannya. Sedangkan *kedua*, konflik ditempuh dengan cara cukup ekstrim yakni melalui aksi kekerasan, pengrusakan harta-benda, dan luka fisik bahkan tidak jarang di lakukan dengan jalansaling membunuh.

Konflik yang kemudian berujung tindakan dengan kekerasan dengan mengatasnamakan agama terjadi sejak dulu. Akan tetapi, kekerasan di Indonesia meningkat tajam terjadi pada era pasca reformasi bergulir, dan hampir selalu didalangi kelompok Islam radikal. Setelah Soeharto lengser, Fron Pembela Islam (FPI) lahir dan hingga kini kerap melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap siapa saja yang dicap melanggar syari'at Islam. Begitu pula dengan jargon menegakkan syari'at Islam sebagai hasil rekomendasinya, pada bulan Agustus tahun 2000, ribuan umat Islam menghadiri kongres I Majelis Mujahidin Indonesia

⁵ Kondisi ini dapat difahami karena kuatnya sistem pemerintahan meliteristik yang dibangun rezim Orde Baru dalam menjaga stabilitas masyarakat, di mana cara-cara atau tindakan prefentif terhadap masyarakat yang tidak pro kebijakannya, dengan segera dapat ditangani baik melalui tindakan kekerasan atau dengan acamana. Sistem yang dibangun Orde Baru ini kemudian dikenal dengan istilah rezim otoriter, di mana rakyat tidak di perkenankan untuk berbeda apalagi menolak segala kehendak penguasa (Presiden). Dalam situasi ini rakyat, tidak berani untuk menampakan perbedaan baik terhadap penguasa maupun dengan antar sesama, yang dapat diketahui oleh penguasa melalui aparat setempat.

terutama berbentuk otoritas, atau kewenangan terhadap penganut agama di bawahnya dalam mana model keberagamaan ditentukan. Hal ini, kiranya berkesesuaian dengan hadith Nabi, bahwa para kyai atau ulama merupakan pewaris para Nabi.

Dengan otoritas yang diraih, dan disertai dengan karakter manusia yang selalu ingin menguasai, maka tentu saja, hal ini mengandaikan terjadinya benturan antara beberapa pemegang otoritas dalam satu agama. Hal ini misalnya terjadi antara Walisongo dengan Syaikh Siti Jenar di Jawa, atau pula antara ulama NU dan Muhammadiyah, dan lain sebagainya dalam menentukan benar tidaknya sesuai wewenang yang dimilikinya.

Dengan demikian, konflik yang terjadi, antara kelompok pengikut Supardi ini dapat dilihat sebagai perebutan otoritas antara Walisongo Akbar, sebagai pendatang baru dengan Kyai Tradisional yang telah dianggap sebagai pemegang kendali kebenaran selama ini. Bagaimana sejarah dan otoritas yang diperebutkan sebagai bingkai dalam konflik keduanya, tesis ini berupaya untuk menelisik secara utuh perihal tersebut.

Dengan melihat konflik internal agama Islam di Sumenep Madura yang pernah terjadi, sebagai problem krusial internal agama, dan tidak menutup kemungkinan akan merembes dengan antar penganut agama lain di Madura. Dengan menghampiri konflik pada tingkat lokal Sumenep, menjadi penting maknanya untuk melihat perkembangan hubungan antar agama atau sesama umat agama dengan isu dan motif yang variatif.

